

Bupati H Muh Adios- Kantah Asnani Teken Kerja Sama, Pelayanan Pertanahan Buton Selatan Diperkuat



- 1 Pemkab Buton Selatan dan Kantah sepakat perkuat sinergi pelayanan pertanahan.
- 2 MoU dan PKS jadi landasan penyelarasan tugas dan fungsi kedua lembaga.
- 3 Bupati Adios: Urusan pertanahan bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
- 4 Kepala Kantah Asnani: Kolaborasi ini tingkatkan efektivitas pelayanan dan manfaat bagi warga.
- 5 Selaras dengan UU No. 5 Tahun 1960 dan upaya digitalisasi layanan pertanahan.

“Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.”

H. Muhammad Adios
Bupati Buton Selatan

Laporan: Firman, Baubau Post-Durasi Times

BUTON SELATAN, BP - Pemerintah Kabupaten Buton Selatan dan Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Selatan menyepakati penguatan kerja sama untuk meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan bagi masyarakat. Kesepakatan tersebut dituangkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Ruang Bupati Buton Selatan, Selasa (15/9/2026).

Kerja sama itu diarahkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi kedua lembaga, terutama dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang pertanahan. Kolaborasi tersebut diharapkan membuat koordinasi

si antara pemerintah daerah dan Kantor Pertanahan berjalan lebih terpadu sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara efektif dan tepat sasaran. Bupati Buton Selatan H. Muham-

mad Adios, S.Sos., M.B.A., mengatakan pemerintah daerah berkepentingan memperkuat koordinasi dengan Kantor Pertanahan karena urusan pertanahan bersentuhan langsung dengan kepentingan

masyarakat. Pemkab, kata dia, akan terus mendukung sinergi antarlembaga untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik.

“Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam pelayanan pertanahan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Pemerintah daerah akan terus mendukung sinergi dengan Kantah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujar Adios.

Kepala Kantor Per-

tanahan Kabupaten Buton Selatan Asnani menilai penandatanganan kesepakatan tersebut menjadi langkah konkret untuk mempererat kolaborasi dengan pemerintah daerah. Kerja sama itu juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan sekaligus memperluas manfaatnya bagi masyarakat.

“Semoga kerja sama ini menjadi langkah nyata dalam

Lanjut ke Hal: 7

Bebas Sanksi Administrasi! Pemkab Buton Selatan Buka Kesempatan Penyelesaian Tunggakan PBB-P2



Laporan: Ardi

BUTON SELATAN, BP - Pemerintah Kabupaten Buton Selatan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang memiliki tunggakan pajak. Melalui kebijakan

pemutihan sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), warga dapat melunasi kewajibannya tanpa dikenakan denda. Kebijakan ini berlaku sejak

Juli hingga akhir September 2026.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Buton Selatan, Drs. MZ Amril Tamim, M.Si., menjelaskan program ini dirancang

untuk mendorong kepatuhan sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Melalui pemutihan ini, masyarakat diberikan kesempatan menyelesaikan kewajiban pajaknya tanpa membayar sanksi administrasi. Kami berharap kebijakan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga kepatuhan dan ketertiban pembayaran pajak semakin meningkat,” ujar Amril, Senin (14/9/2026).

Selain pemutihan, Pemkab Buton Selatan juga memperkuat

Lanjut ke Hal: 7

Lapas Baubau Periksa 32 Kamar, Razia Gabungan TNI, Polri dan BNN Tak Temukan HP dan Narkoba



Laporan: Firman

BAUBAU, BP - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Baubau memperketat pengawasan internal melalui operasi pengeleda-

han gabungan dan tes urine yang melibatkan aparat penegak hukum, Selasa (17/9/2026). Dari pemeriksaan terhadap 32 kamar warga binaan,

Lanjut ke Hal: 7

Ditemukan Sumber Air Baru di Burangasi, Bupati Adios: Jawaban Atas Doa Warga yang Selama Ini Menanti



Laporan: Ardi

BUTON SELATAN, BP - Bupati Buton Selatan, H. Muhammad Adios, S.Sos., M.B.A., meninjau langsung sumber air baru yang muncul di Desa Burangasi, Kecamatan Lapandewa. Sumber air yang baru mengalir

beberapa hari terakhir ini diharapkan menjadi solusi pemenuhan kebutuhan air bersih bagi warga desa dan wilayah sekitarnya.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati didampingi Sekretaris Daerah, Asisten I Setda, para Kepala

Lanjut ke Hal: 7

Bapas Baubau Perkuat Tata Kelola Anggaran dan Kehumasan Melalui Bimtek



Laporan: Prasetyo

BAUBAU, BP - Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Baubau memperkuat kapasitas jajaran dalam pengelolaan anggaran dan komunikasi publik dengan mengikuti Pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Anggaran

dan Kehumasan di Aula Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tenggara, Kamis (17/9/2026).

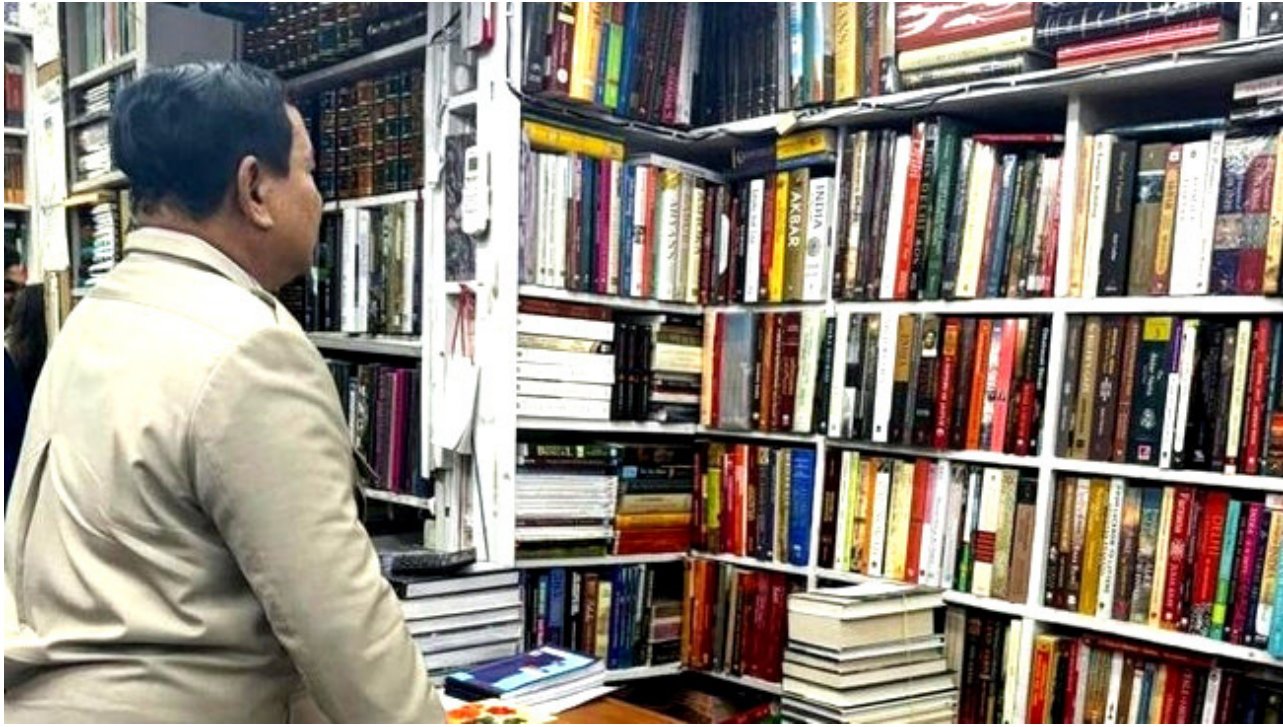
Kepala Bapas Kelas II Baubau Mustar Taro hadir dalam kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kompetensi jajaran pe-

masyarakatan. Bimtek ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola organisasi agar pelaksanaan tugas berjalan profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Materi penyusunan anggaran diarahkan

Lanjut ke Hal: 7

Prabowo Kenang Masa Sulit 1998, Buku Paulo Coelho Jadi Penguat Dirinya



Presiden Prabowo Subianto mengungkap buku berjudul *Warrior of the Light* karya novelis asal Brazil, Paulo Coelho jadi salah satu buku favoritnya.

Laporan: Alwan

JAKARTA, BP- Presiden Prabowo Subianto mengungkap pengalaman emosionalnya ketika membaca *Warrior of the Light* karya penulis Brasil, Paulo Coelho, pada awal 2000-an. Buku yang diperolehnya dari sang kakak, Maryani Djojohadikusumo, itu dibaca ketika Prabowo mengaku sedang berada dalam fase paling sulit dalam perjalanan hidupnya.

Prabowo menceritakan pengalaman tersebut dalam program Presiden Prabowo Menjawab, yang dikutip pada Jumat (18/9). Menurut dia, meski *Warrior of the Light* merupakan buku yang relatif tipis, isinya terasa sangat dekat dengan keadaan yang tengah dihadapinya ketika itu.

Ia mengatakan pesan dalam buku tersebut begitu membekas hingga membuatnya menangis saat membacanya. Prabowo merasa tulisan Coelho seolah berbicara langsung mengenai situasi yang sedang dialaminya.

"Habis itu saya baca, saya baca itu, terus aja saya keluar air mata, seolah-olah dia bicara ke saya," kata Pra-

bowo.

Buku tersebut, kata Prabowo, dikenalnya setelah diberikan Maryani pada awal 2000-an. Saat itu, ia tengah menjalani periode setelah berakhirnya karier militernya pada penghujung 1990-an dan menghadapi berbagai tuduhan yang menurutnya membuat dirinya berada di titik nadir.

"Saya lagi bisa dikatakan saya di titik nadir, saya habis lengser 98/99, saya dituduh macam-macam, kudet, ini semua, penculikan apa semua, saya titik nadir," ujarnya.

Periode yang dimaksud Prabowo berkaitan dengan gejolak politik Indonesia pada 1998. Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 setelah 32 tahun berkuasa dan digantikan Wakil Presiden B.J. Habibie. Sehari setelah pergantian kekuasaan itu, Prabowo dicopot dari jabatan Pangkostrad di tengah ketegangan mengenai pergerakan pasukan dan situasi keamanan Jakarta.

Catatan sejarah mengenai periode tersebut juga mencakup kontroversi penculikan aktivis 1997-1998. Dewan Kehormatan Perwira pada 1998

menyatakan Prabowo melakukan "misinterpretasi perintah" dalam kasus penculikan sembilan aktivis dan merekomendasikan penghentian dari dinas militer. Prabowo sendiri kemudian berulang kali membantah sejumlah tuduhan terkait peristiwa tersebut.

Dalam konteks itulah, pengalaman membaca karya Coelho menjadi bagian dari cerita personal yang disampaikan Prabowo. Ia mengatakan dirinya langsung membaca buku tersebut dan meresapi isinya karena menemukan pesan yang terasa berhubungan dengan keadaan hidupnya saat itu.

"Bukunya malah enggak terlalu tebal, tipis, buku itu ditulis orang Brazil, Paulo Coelho, *Warrior of the Light*," kata Prabowo.

Secara historis, *Warrior of the Light* atau *Manual of the Warrior of Light* diterbitkan Coelho pada 1997. Karya tersebut lahir dalam periode ketika nama Coelho telah dikenal luas melalui *The Alchemist*, novel yang pertama kali diterbitkan dalam bahasa Portugis pada 1988 dan kemudian berkembang menjadi salah satu karya sastra Brasil

yang dikenal secara internasional.

Coelho sendiri dikenal sebagai penulis Brasil yang banyak mengeksplorasi tema pencarian makna, perjalanan batin, dan spiritualitas. Akademi Sastra Brasil mencatat sejumlah karya pentingnya, termasuk *The Alchemist* pada 1988 dan *The Manual of the Warrior of Light* pada 1997.

Bagi Prabowo, buku tersebut tidak sekadar menjadi bacaan, tetapi memiliki makna personal karena hadir ketika dirinya menghadapi masa penuh tekanan. Ia kemudian menyarankan generasi muda Indonesia untuk membaca karya-karya Paulo Coelho, termasuk *Warrior of the Light* dan *The Alchemist*.

Kisah tersebut sekaligus menunjukkan bagaimana sebuah karya sastra dapat memperoleh makna berbeda bagi setiap pembaca. Dalam pengalaman yang diceritakan Prabowo, buku Coelho hadir sebagai bacaan yang menurutnya mampu memberikan ruang refleksi ketika ia menghadapi salah satu periode paling berat dalam perjalanan hidupnya. (*)

Zulhas Ungkap Alasan PAN Tiga Kali Berturut-turut Mendukung Prabowo



HUT PAN dihadiri Prabowo

Laporan: Alwan

JAKARTA, BP- Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan alias Zulhas mengungkapkan alasan partainya tiga kali berturut-turut memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, 2019, dan 2024. Menurut dia, konsistensi tersebut berangkat dari persamaan nilai perjuangan dan cita-cita politik, bukan semata-mata kalkulasi elektoral.

Pernyataan itu disampaikan Zulhas dalam acara HUT ke-28 PAN yang turut dihadiri Presiden Prabowo Subianto. Ia mengatakan hubungan PAN dan Prabowo telah berlangsung panjang sehingga dukungan politik yang diberikan dalam tiga kontestasi Pilpres merupakan bagian dari perjalanan perjuangan yang telah mereka lewati bersama.

"Karena ada persamaan nilai perjuangan dan cita-cita dalam membangun negara untuk mewujudkan kedaulatan bangsa, khususnya Pasal 33 dan 34. Baru Bapak yang bicara mengenai Pasal 33. Komitmen itu yang kita pegang teguh," ujar Zulhas.

Dukungan PAN kepada Prabowo pertama kali terjadi pada Pilpres 2014. Saat itu, Prabowo berpasangan dengan Hatta Rajasa, yang merupakan Ketua Umum PAN. Pasangan tersebut didukung sejumlah partai, termasuk Gerindra dan PAN, tetapi akhirnya kalah dari pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Prabowo-Hat-

ta memperoleh 46,85 persen suara, sedangkan Jokowi-JK meraih 53,15 persen.

Lima tahun kemudian, PAN kembali berada di barisan pendukung Prabowo ketika ia maju sebagai calon presiden bersama Sandiaga Uno. Pilpres 2019 kembali dimenangkan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dengan 55,50 persen suara, sedangkan Prabowo-Sandiaga memperoleh 44,50 persen dari suara nasional.

Meski dua kali mengalami kekalahan dalam kontestasi tersebut, PAN kembali mendukung Prabowo pada Pilpres 2024. Dukungan itu menjadikan PAN tiga kali berturut-turut berada di belakang Prabowo, sekaligus mengantarkan Prabowo-Gibran Raka-buming Raka memperoleh 96.214.691 suara berdasarkan rekapitulasi nasional KPU yang ditetapkan pada 20 Maret 2024.

Zulhas mengenang keputusan PAN untuk kembali mendukung Prabowo pada 2024. Ia mengatakan, sebelum keputusan itu diambil, dirinya menemui Prabowo yang ketika itu masih menjabat Menteri Pertahanan di kantor Kementerian Pertahanan.

Dalam pertemuan tersebut, Zulhas menyampaikan bahwa PAN tetap memilih bersama Prabowo meskipun Partai Gerindra dapat bergerak sendiri dalam menghadapi Pilpres 2024. "Pak, walaupun Gerindra sendiri, kami bersama Bapak. Kita

tuntaskan cita-cita perjuangan Bapak, insyaallah kali ini berhasil," kata Zulhas.

Menurut Zulhas, pengalaman panjang tersebut membuat PAN tidak perlu lagi membuktikan loyalitasnya kepada Prabowo. Ia mengingatkan bahwa partainya tetap bersama Prabowo ketika dua kali mengalami kekalahan sebelum akhirnya meraih kemenangan pada Pilpres 2024.

"Kebersamaan PAN dan Pak Prabowo telah melewati sejarah panjang dan berliku. Tidak hanya satu musim pemilu presiden, tapi sudah puluhan tahun berjuang bersama-sama," ujar Zulhas.

Secara historis, perjalanan Prabowo dalam pemilihan presiden memang berlangsung lintas empat kontestasi. Pada 2009, ia menjadi calon wakil presiden mendampingi Megawati Soekarnoputri. Pada 2014 dan 2019 ia maju sebagai calon presiden, sebelum akhirnya memenangkan Pilpres 2024 bersama Gibran.

Zulhas menilai keberlanjutan dukungan PAN tersebut berkaitan dengan kesamaan agenda perjuangan, terutama gagasan mengenai kedaulatan bangsa serta amanat Pasal 33 dan 34 UUD 1945. Ia menegaskan komitmen itulah yang menurutnya menjadi salah satu dasar PAN mempertahankan kebersamaan politik dengan Prabowo dalam tiga Pilpres berturut-turut. (*)

Pemprov Sultra Raih Dua Penghargaan di Makassar, Bawa Pulang Dana Rp3 Miliar



Laporan: Lisna

MAKASSAR, BP- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) memperoleh dua penghargaan pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Sulawesi di Makassar, Jumat malam (18/9/2026). Dua penghargaan tersebut menempatkan Sultra di posisi kedua pada kategori Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan serta Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri, dengan total dana apresiasi Rp3 miliar.

Penghargaan itu diterima di tengah agenda yang dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, serta sejumlah kepala daerah se-Sulawesi. Acara berlangsung di Hotel Claro Makassar dan diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja pemerintah daerah sekaligus dorongan untuk memperkuat inovasi dan pelayanan publik.

Bagi Sultra, capaian tersebut melanjutkan hasil pada Batch I yang digelar di Kota Kendari pada Juni 2026. Pada ajang sebelumnya, Pemprov Sultra meraih peringkat kedua untuk kategori Creative Financing, sehingga rangkaian penghargaan 2026 menambah catatan capaian provinsi tersebut dalam beberapa aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Gubernur Sultra

Andi Sumangerukka mengatakan bidang kesehatan menjadi salah satu fokus pembangunan pemerintah provinsi. Karena itu, penghargaan pada kategori akses dan kualitas layanan kesehatan dinilai berkaitan dengan upaya pemerintah memperkuat pelayanan dasar bagi masyarakat.

“Saya bersama seluruh masyarakat menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Mendagri yang memberikan apresiasi kepada kami, termasuk fiskalnya, yang akan digunakan untuk kepentingan masyarakat,” kata Andi Sumangerukka dalam konferensi pers bersama Mendagri usai acara.

Di bidang lingkungan, Pemprov Sultra juga menjalankan agenda kebersihan secara rutin. Sepanjang 2026, pemerintah provinsi menancangkan kegiatan korve atau kerja bakti bersama setiap pekan yang dilaksanakan pada hari Selasa. Program tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan tetap bersih dan asri.

Dalam penilaian pada kategori Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri, Sultra bersama Sulawesi Selatan tercatat memperoleh penghargaan. Trofi kategori tersebut diserahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada perwakilan pemerintah provinsi pada malam penganugerahan di Makassar.

Prestasi Sultra

juga beriringan dengan capaian pemerintah daerah lain di kawasan Sulawesi. Pada kategori Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan tingkat kota, Kota Kendari menempati peringkat pertama dan memperoleh dana apresiasi Rp2 miliar, sedangkan Kota Baubau berada di posisi kedua dengan dana apresiasi Rp1,5 miliar.

Pemberian apresiasi tersebut berlangsung dalam konteks penyelenggaraan otonomi daerah yang telah berkembang selama lebih dari dua dekade. Indonesia memasuki fase penting desentralisasi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan ruang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan berdasarkan prinsip desentralisasi.

Kerangka pemerintahan daerah kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Regulasi tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan antara lain untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah.

Fokus terhadap

layanan kesehatan dan lingkungan juga memiliki konteks global. Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2015 mengadopsi Agenda 2030 dan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), termasuk tujuan mengenai kehidupan sehat dan kesejahteraan, air dan sanitasi, serta pembangunan kota dan permukiman berkelanjutan.

Pengelolaan sampah dan lingkungan menjadi bagian penting agenda tersebut karena sampah yang tidak tertangani dapat menyumbat saluran air, meningkatkan risiko banjir, serta berkontribusi terhadap penyebaran penyakit berbasis air. PBB juga menempatkan pengurangan timbulan sampah, daur ulang, serta pengelolaan limbah yang aman sebagai bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan.

Dengan tambahan dua penghargaan pada Batch II, Pemprov Sultra mencatat tiga penghargaan peringkat kedua dalam rangkaian Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026. Pemerintah provinsi menyatakan dana apresiasi yang diterima akan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, terutama dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah.(*)

Antrean BBM Memanjang, Satpol PP Kendari Tertibkan Penjualan Eceran Dekat SPBU



Laporan: Mashuri

KENDARI, BP- Pemerintah Kota Kendari memperketat pengawasan aktivitas penjualan bahan bakar minyak (BBM) eceran di sekitar stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) setelah antrean BBM bersubsidi sempat memanjang di sejumlah titik. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mulai menyosialisasikan larangan tersebut kepada pedagang sebelum penertiban dilakukan.

Sosialisasi berlangsung di sekitar SPBU Anduonohu dan SPBU Tapak Kuda, Kota Kendari, Jumat (18/9/2026). Pelaksana Tugas (Plt) Kasat Satpol PP Kota Kendari Dasril Yamin bersama personelnnya meminta pedagang memahami ketentuan yang berlaku dan menghentikan aktivitas perdagangan BBM di kawasan tersebut.

Dasril mengatakan, pemerintah tidak langsung melakukan penertiban terhadap stok yang masih dimiliki pedagang. Mereka diberi kesempatan untuk menghabiskan persediaan BBM yang tersisa, kemudian diminta tidak kembali menjual BBM di sekitar SPBU.

“{Kami melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada pedagang-pedagang eceran di sekitar SPBU Anduonohu dan SPBU Tapak Kuda untuk segera menghabiskan sisa stok BBM yang masih ada. Setelah itu untuk tidak berjualan lagi di sekitaran SPBU,” kata Dasril.

Larangan tersebut bukan aturan baru yang dibuat dalam penanganan antrean BBM saat ini. Pemerintah Kota Kendari mendasarkan penertiban pada Peraturan Daerah Kota Kendari No-

mor 10 Tahun 2014. Pasal 9 ayat (6) pada itu menyebutkan bahwa setiap orang dilarang berdagang bahan bakar minyak atau BBM di sekitar pompa bensin atau SPBU.

Penegakan aturan tersebut ditempatkan sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban kawasan SPBU. Antrean panjang sebelumnya membuat masyarakat membutuhkan waktu lebih lama untuk memperoleh BBM dan memicu kepadatan di sejumlah lokasi pengisian.

Persoalan distribusi BBM sendiri telah berulang menjadi perhatian pemerintah di Indonesia. Pemerintah menerapkan kebijakan subsidi BBM sejak era awal kemerdekaan dan mekanisme subsidi terus berubah mengikuti kondisi ekonomi, harga minyak dunia, serta kebijakan energi nasional. Antrean di SPBU juga menjadi fenomena yang muncul pada berbagai periode ketika pasokan dan permintaan BBM mengalami tekanan.

Secara historis, perubahan harga minyak dunia turut memengaruhi kebijakan energi banyak negara. Krisis minyak 1973 dan 1979, misalnya, mendorong banyak negara memperkuat cadangan energi, efisiensi konsumsi, serta pengawasan distribusi bahan bakar. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa kelancaran distribusi menjadi salah satu unsur penting dalam menjaga akses masyarakat terhadap en-

ergi.

Di Kendari, penanganan antrean tidak hanya diarahkan pada aktivitas perdagangan BBM eceran. Pemkot bersama Pertamina pada Jumat (18/9/2026) menggelar rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Wali Kota Kendari Sudirman untuk membahas penguatan pengawasan distribusi BBM serta rencana pembentukan satuan tugas (Satgas).

Satgas yang direncanakan melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), DPRD, aparat penegak hukum, Pemkot Kendari, dan Pertamina. Pengawasan diarahkan untuk memastikan distribusi BBM berjalan sesuai ketentuan sekaligus mencegah penyalahgunaan.

Pertamina juga melakukan sejumlah langkah untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat, antara lain mempercepat pengiriman BBM dari depot dan menambah nozzle Peralite di sejumlah SPBU. Langkah tersebut dilakukan bersamaan dengan pengawasan di lapangan untuk mengurai antrean.

Dengan demikian, kebijakan Pemkot Kendari memiliki dua jalur penanganan, yakni penertiban aktivitas yang dilarang perda dan pembenahan distribusi BBM. Sosialisasi kepada pedagang menjadi tahap awal sebelum penindakan terhadap aktivitas perdagangan BBM eceran di sekitar SPBU dilakukan sesuai ketentuan.(*)

Bupati Buton Tengah Azhari Gandeng Yayasan Haji Kalla Siapkan Lima Wilayah Jadi Percontohan Ekonomi Produktif Desa



Laporan:Ardi

BUTON TENGAH, BP- Pemerintah Kabupaten Buton Tengah menyiapkan pengembangan ekonomi produktif berbasis potensi desa sebagai salah satu strategi memperluas lapangan kerja mandiri. Untuk merealisasikan agenda itu, pemerintah daerah memperkuat kolaborasi dengan Yayasan Haji Kalla melalui program pemberdayaan masyarakat yang diarahkan agar dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Langkah tersebut dibahas Bupati Buton Tengah, Dr. Azhari, ketika menerima Tim Community Development Yayasan Haji Kalla bersama Senior Manager Program, Reni, dan rombongan di Rumah Jabatan Bupati Buton Tengah, Selasa (15/9/2026). Pertemuan itu membahas pengembangan program yang dinilai dapat memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat desa.

Azhari mengatakan, program pemberdayaan harus bertumpu pada potensi yang tersedia di masing-masing wilayah. Pemerintah daerah tidak ingin pengembangan ekonomi desa

hanya menghasilkan kegiatan sesaat, tetapi mampu menciptakan usaha yang dapat dikelola masyarakat secara mandiri.

“Potensi desa harus dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi masyarakat sekaligus membuka lapangan kerja mandiri,” kata Azhari.

Sejumlah program Yayasan Haji Kalla yang telah berjalan di Buton Tengah menjadi pijakan untuk memperluas model tersebut. Di Desa Kamama Mekar, program diarahkan pada budidaya mutiara, sedangkan di Desa Bantea dikembangkan budidaya ayam kampung.

Kedua kegiatan itu menunjukkan bahwa sumber daya lokal dapat dikembangkan menjadi aktivitas ekonomi produktif apabila disertai pendampingan dan penguatan kapasitas masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah mendorong pendampingan program percontohan di Tolandona, Kolowa,

Wadiabero, Desa Wantopi, dan Lagili. Pemilihan wilayah tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas cakupan pemberdayaan ekonomi berbasis desa.

“Program yang sudah berjalan dapat dikembangkan dan diperluas ke desa-desa yang memiliki potensi serupa,” ujar Azhari.

Secara historis, pendekatan pembangunan berbasis masyarakat bukan gagasan baru. Sejak perkembangan konsep pembangunan pedesaan pada paruh kedua abad ke-20, berbagai negara semakin memberi perhatian pada penguatan kapasitas masyarakat lokal, pengembangan usaha kecil, dan pemanfaatan sumber daya setempat sebagai bagian dari pembangunan ekonomi. Di Indonesia, arah tersebut juga berkembang melalui berbagai kebijakan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa.

Dalam konteks Buton Tengah, pengembangan komoditas lokal menjadi penting karena karakter wilayah kepulauan dan perdesaan memiliki sumber daya yang beragam. Budidaya mutiara dan ayam kampung mer-

upakan dua contoh kegiatan yang memperlihatkan bagaimana potensi spesifik wilayah dapat diarahkan menjadi sumber penghidupan masyarakat.

Azhari berharap kerja sama pemerintah daerah dan Yayasan Haji Kalla tidak berhenti pada pelaksanaan program, tetapi dilanjutkan dengan pendampingan yang terukur. Menurut dia, keberlanjutan, kesesuaian dengan potensi lokal, serta kemampuan masyarakat mengelola usaha menjadi unsur penting dalam menentukan dampak program.

“Kami berharap sinergi ini berjalan berkelanjutan dan melahirkan praktik baik yang bisa direplikasi di wilayah lain,” kata Azhari.

Kolaborasi tersebut pada akhirnya diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat desa. Pemerintah Kabupaten Buton Tengah berharap model pemberdayaan yang dikembangkan bersama Yayasan Haji Kalla dapat memperluas kegiatan ekonomi produktif sekaligus menciptakan lebih banyak kesempatan kerja berbasis potensi lokal. (*)

Pemda dan DPRD Buton Utara Sepakati Perubahan KUA-PPAS Tahun 2026



Laporan:Firman

BURANGA, BP- Pemerintah Kabupaten Buton Utara dan DPRD Buton Utara menyepakati perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026. Kesepakatan tersebut menjadi pijakan bagi pemerintah daerah untuk melanjutkan penyusunan Rancangan Perubahan APBD 2026 di tengah tekanan efisiensi belanja.

Kesepakatan dituangkan melalui penandatanganan nota perubahan KUA dan PPAS dalam rapat paripurna DPRD Buton Utara di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Buton Utara, Rabu (16/9/2026). Rapat tersebut dihadiri Wakil Bupati Buton Utara Rahman, S.K.M., M.Kes., bersama pimpinan dan anggota DPRD.

Tahap berikutnya adalah penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang akan menjadi bagian dari proses penyusunan Rancangan Perubahan APBD Buton Utara Tahun Anggaran 2026. Pemerintah daerah dan DPRD perlu menjaga kesinambungan antara perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), perubahan KUA-PPAS, dan dokumen anggaran berikutnya.

Wakil Bupati Rahman mengatakan perubahan KUA dan PPAS merupakan instrumen untuk menyesuaikan kebijakan fiskal daerah dengan perkembangan asumsi makroekonomi, kemampuan keuangan, serta prioritas pembangunan. Penyesuaian tersebut diperlukan agar anggaran tetap diarahkan

pada kebutuhan yang dianggap penting bagi masyarakat.

“Tekanan efisiensi belanja menuntut kita untuk semakin selektif dan cermat dalam merumuskan kebijakan fiskal sesuai skala prioritas,” kata Rahman dalam rapat paripurna tersebut.

Menurut dia, kondisi fiskal daerah harus menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menyusun perubahan anggaran. Karena itu, strategi pendapatan, belanja, dan pembiayaan perlu ditelaah kembali melalui evaluasi program dan kegiatan agar penggunaan anggaran tetap realistis.

Rahman juga meminta proses pembahasan dilakukan secara optimal karena batas waktu penyusunan perubahan APBD 2026 semakin dekat. “Mengingat batas waktu yang semakin dekat, saya sangat berharap agar seluruh pihak dapat mengoptimalkan pembahasan,” ujarnya.

Ia berharap kerja sama antara pemerintah daerah dan DPRD tetap berjalan sesuai fungsi masing-masing. Sinkronisasi antardokumen perencanaan dan penganggaran dinilai penting agar agenda pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik di Buton Utara dapat berjalan sesuai jadwal.

Dalam praktik pemerintahan daerah di Indonesia, KUA-PPAS merupakan bagian penting dari siklus penganggaran karena menjadi dasar bagi pembahasan rancangan APBD. Sistem tersebut berkembang seiring penguatan tata

kelola keuangan daerah setelah era reformasi dan desentralisasi, terutama sejak pelaksanaan otonomi daerah pada awal 2000-an.

Secara historis, reformasi pengelolaan keuangan publik Indonesia juga ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kerangka tersebut menempatkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban sebagai rangkaian yang saling berkaitan dalam pengelolaan keuangan pemerintah.

Secara internasional, penyesuaian anggaran daerah juga tidak terlepas dari perkembangan tata kelola fiskal setelah berbagai tekanan ekonomi global, termasuk krisis keuangan 2008 dan pandemi Covid-19 pada 2020. Pemerintah di berbagai negara kemudian menghadapi kebutuhan menyeimbangkan belanja publik, pemulihan ekonomi, serta keberlanjutan fiskal.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri para staf ahli bupati dan asisten Setda, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara, serta Direktur RSUD Buton Utara. Seluruh tahapan selanjutnya diarahkan untuk memastikan perubahan APBD 2026 dapat dibahas berdasarkan kondisi fiskal dan prioritas pembangunan daerah. (*)

41 Persen Anak Sekolah Alami Karies, Kemenkes Dorong Pemeriksaan Tiap 6 Bulan



Peliput: Lisna

JAKARTA, BP_ Pemeriksaan kesehatan melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG) menemukan masalah karies pada 41 persen anak sekolah yang diperiksa. Temuan tersebut mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI memperkuat edukasi dan pencegahan penyakit gigi serta mendorong pemeriksaan secara rutin sejak usia sekolah.

Wakil Menteri Kesehatan Prof. Dante Saksono Harbuwono mengatakan pemeriksaan gigi merupakan salah satu prioritas dalam program CKG. Menurut dia, tingginya temuan karies menunjukkan bahwa persoalan kesehatan gigi masih membutuhkan perhatian serius, terutama melalui intervensi sebelum anak mengalami keluhan atau rasa sakit.

“Intervensi kesehatan gigi yang paling tepat adalah melalui promotif dan preventif, bukan menunggu sakit kemudian mengobatinya,” ujar Dante dalam Kick-off Bulan Kesehatan Gigi Nasional (BKGN) 2026 di SDN Menteng 01, Jakarta, Kamis (17/9/2026).

Kemenkes mengan-

jurkan pemeriksaan gigi dilakukan setiap enam bulan untuk menemukan gangguan sejak dini. Upaya tersebut perlu disertai kebiasaan menyikat gigi setelah sarapan dan sebelum tidur malam, serta pemilihan makanan yang mendukung kesehatan gigi. Penggunaan pasta gigi berfluoride juga diperkenalkan sebagai bagian dari perawatan sehari-hari.

Lingkungan sekolah dinilai memiliki posisi penting dalam membentuk kebiasaan tersebut. UKS, dokter kecil, pramuka, dan kegiatan sekolah lainnya dapat digunakan sebagai sarana edukasi. Siswa bahkan dapat dilibatkan sebagai “detektif gigi berlubang” untuk membantu mengenali tanda-tanda gangguan kesehatan gigi pada teman sebaya.

Masalah karies pada anak bukan persoalan baru dalam kesehatan masyarakat. Secara historis, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menempatkan penyakit gigi dan mulut sebagai bagian penting dari agenda kesehatan global karena karies gigi merupakan salah satu penyakit tidak menular yang paling

umum. Pencegahan sejak anak-anak menjadi pendekatan penting untuk mengurangi beban perawatan ketika gangguan gigi berkembang menjadi lebih berat.

Di Indonesia, perhatian terhadap kesehatan gigi anak juga telah lama dilakukan melalui layanan kesehatan berbasis sekolah. Salah satu instrumen yang dikenal adalah kegiatan Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS), yang dikembangkan sebagai bagian dari pelayanan kesehatan gigi dan mulut bagi peserta didik. Pendekatan tersebut sejalan dengan penguatan program promotif dan preventif yang kini didorong melalui CKG.

BKGN menjadi salah satu wadah kolaborasi untuk memperluas edukasi dan pelayanan kesehatan gigi kepada masyarakat. Kegiatan tersebut pertama kali dilaksanakan pada 2010 dan pada 2026 memasuki penyelenggaraan ke-17. Tahun ini, BKGN mengangkat tema “Gigi Kuat, Senyum Sehat, Indonesia Hebat” dengan subtema “Periksa, Tindak Lanjut, Jaga Kesehatan Gigi dan Mulut.”

Wakil Ketua Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia

(PB PDGI) drg. Tari Tritarayati mengatakan edukasi kesehatan gigi perlu dilanjutkan dengan perawatan dan pembentukan kebiasaan. “Kami ingin memperkuat upaya promotif dan preventif agar kepedulian terhadap kesehatan gigi tidak berhenti pada pemeriksaan, tetapi dilanjutkan dengan perawatan dan kebiasaan menjaga kesehatan gigi,” katanya.

BKGN 2026 digelar melalui kolaborasi Kemenkes, PB PDGI, Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia (AFDOKGI), Asosiasi Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Indonesia, serta mitra swasta. Kick-off di SDN Menteng 01 diisi edukasi kesehatan gigi, pemeriksaan gigi gratis, dan praktik menyikat gigi bersama bagi para siswa.

Dante menilai temuan CKG tersebut menjadi pengingat bahwa kesehatan gigi anak tidak cukup ditangani ketika penyakit sudah muncul. “Berita baiknya, pemeriksaan gigi adalah salah satu prioritas pemerintah dalam program Cek Kesehatan Gratis. Namun, kabar kurang baiknya, dari hasil pemeriksaan CKG anak sekolah, masalah karies justru menjadi yang paling banyak ditemukan,” ujarnya.(*)

Kemenkes Perkuat Respons Hoaks Kesehatan di Tengah Turunnya Imunisasi

Peliput: Firman

JAKARTA , BP_ Pemerintah memperkuat sistem penanganan hoaks kesehatan setelah penurunan cakupan imunisasi nasional dan munculnya kembali wabah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Kementerian Kesehatan bersama Kementerian Komunikasi dan Digital serta sejumlah mitra meluncurkan Playbook Respons Cepat Penanganan Hoaks Kesehatan di Jakarta, Kamis (17/9/2026), sebagai pedoman kerja bersama menghadapi penyebaran informasi palsu di ruang digital.

Penguatan tersebut dilakukan ketika penetrasi internet Indonesia pada 2026 mencapai 81,72 persen berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). Di tengah semakin luasnya akses masyarakat terhadap informasi digital, Komdigi mencatat 2.622 hoaks kesehatan beredar di berbagai platform sepanjang Agustus 2018 hingga September 2026. Imunisasi menjadi salah satu topik yang paling banyak disasar.

Dampaknya berkecenderungan program imunisasi. Data Direktorat Pengelolaan Imunisasi Kemenkes menunjukkan cakupan imunisasi nasional turun dari 95 persen pada 2023 menjadi 87 persen pada 2024 dan 80 persen pada 2025. Padahal, untuk membentuk kekebalan masyarakat secara universal hingga tingkat kabupaten/kota, cakupan imunisasi diperlukan pada kisaran 90-95 persen.

Penurunan kekebalan tersebut terjadi bersamaan dengan munculnya wabah. Sepanjang 2025-2026, Kemenkes mencatat kejadian luar biasa

atau wabah campak di sejumlah daerah yang menyebabkan 72 anak meninggal dunia. Sebelumnya, polio yang dapat menimbulkan lumpuh layu akut pada anak kembali mewabah pada 2023-2024 di Papua, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Secara historis, imunisasi telah menjadi salah satu intervensi kesehatan masyarakat yang paling luas digunakan untuk mengendalikan penyakit menular. Di Indonesia, program imunisasi nasional berkembang sejak program imunisasi massal cacar pada era 1950-an dan kemudian diperluas melalui program imunisasi rutin. Secara global, keberhasilan imunisasi juga berkontribusi terhadap eradikasi cacar pada 1980 dan mendorong upaya dunia mengeliminasi penyakit lain seperti polio dan campak.

Namun, kemajuan tersebut dapat terhambat ketika informasi keliru memengaruhi keputusan masyarakat. Karena itu, perlindungan kesehatan tidak hanya dilakukan melalui pemeriksaan, pengobatan, dan imunisasi, tetapi juga dengan menyediakan pesan kesehatan yang akurat, menarik, dan mudah dipahami. Informasi keliru yang ditangani Kemenkes juga mencakup isu tuberkulosis, air susu ibu, vitamin, dan suplemen untuk imunitas tubuh.

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengatakan pola penanganan hoaks yang selama ini bersifat ad hoc perlu diubah menjadi sistem yang lebih terstruktur. “Kementerian Kesehatan terus memperkuat sistem penanganan hoaks mulai dari pe-nataan regulasi dan tata kelola, penguat-

tan koordinasi lintas sektor, pengembangan kanal penanganan hoaks terintegrasi hingga penyusunan Playbook Respons Cepat Penanganan Hoaks Kesehatan,” kata Dante.

Playbook itu melibatkan Komdigi, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Pokja Komunikasi Risiko dan Pelibatan Masyarakat (RCCE), organisasi profesi, masyarakat sipil, platform digital, pakar, akademisi, dan praktisi. Mekanisme bersama tersebut mencakup deteksi, moderasi, verifikasi, produksi komunikasi, hingga penyebaran informasi tandingan. Dante menekankan perlunya sistem pemantauan dan verifikasi cepat agar sumber daya dapat segera digerakkan ketika isu muncul.

Ketua Pokja RCCE Rizky Ika Syafitri mengatakan loka-karya penyusunan mekanisme tersebut sekaligus menjadi ruang untuk memperjelas pembagian peran dan waktu respons setiap pihak. “Dalam hal penanganan hoaks, speed dan timing sama pentingnya dengan akurasi informasi,” ujar Rizky.

Persoalan hoaks kesehatan sendiri tidak hanya dihadapi Indonesia. Penyebaran disinformasi kesehatan telah menjadi perhatian internasional, terutama setelah pandemi Covid-19 memperlihatkan cepatnya informasi palsu menyebar melalui platform digital. Perwakilan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Aqueelah Johnson, mengatakan pemerintah Amerika Serikat melalui proyek Global Health Security yang dikelola Department of State mendukung kolaborasi penanganan hoaks kesehatan di Indonesia. “Amerika Serikat senang dapat bekerja sama dengan Indonesia dalam isu penting ini,” kata Aqueelah.(*)

PT FAREN GRAFIKA
Harian Pagi
Baubau Post

KRITIK, LUGAS, DAN INDEPENDEN

Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam melakukan tugas jurnalistik

Dalam Pelaksanaan Tugas, Wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu, masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post

Segala berita yang diterbitkan oleh Baubau Post meruoakan tanggung jawab penanggungjawab redaksi

Pemimpin Umum: Fauzan NWA
Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi: Ardi
Redpel: Prasetyo
Korlip: Firman
Redaktur: Kasrun,Rahim
Reporter: Mashuri, Lisna, Asis, Hafid, Amat Jr, Noval, La Harman

Layouter: Ririn
Pracetak: Aditya
Cetak Jamaludin

Penerbit: PT FAREN GRAFIKA
Komisaris: Erna Agule
Direktur Utama: Andina Latief
Manager Keuangan: Nabila DAA
Manager Iklan & Pemasaran: Jamaluddin
Kepala Sirkulasi: Robi
Administrasi: Salvana

Kepala Biro Wakatobi: Risman
Kepala Biro Buton Utara: Kasrun
Kepala Biro Buton: La Harman
Kepala Biro Buton Selatan: Firman
Kepala Biro Buton Tengah: Komarudin
Kepala Biro Sultra: Masuri

Agen Baubau: Jamaluddin
Agen Buton Selatan: Firman
Agen Buton: Samrihan
Agen Buton Utara: Kasrun

Harga dan Langganan: Dalam Kota Baubau 100.000/bulan,

Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim Eceran dalam Kota Baubau Rp 5000/eks

Alamat Redaksi/Tata usaha: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01
Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara
Tlp 0402-2014287- Email: baubaupost2019@gmail.com, ardiandina7786@gmail.com

Percetakan: PT Faren Grafika, Alamat:Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01
Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara

PT AAT Diblokir, Kemenhaj Dalam Dugaan Ponzi yang Rugikan Jemaah Rp120 Miliar



Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan

Laporan: Amran

SURABAYA, BP-Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memblokir akun Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Siskopatuh) milik PT AAT setelah biro perjalanan tersebut diduga menggunakan pola pembiayaan yang menyerupai skema Ponzi. Penelusuran sementara pemerintah mencatat hampir 4.000 calon jemaah terdaftar, dengan nilai dana yang harus dipertanggungjawabkan diperkirakan mencapai Rp120 miliar.

Pemblokiran dilakukan untuk menghentikan pendaftaran jemaah baru melalui biro perjalanan tersebut sekaligus mencegah bertambahnya korban. Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan mengatakan akses Siskopatuh PT AAT ditutup sampai kewajiban perusahaan terhadap jemaah diselesaikan. Jika nantinya terbukti terdapat tindak pidana berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap, sanksi administratif dapat berlanjut hingga pencabutan izin.

Kasus itu mencuat setelah 200 calon jemaah umrah dari KBIHU Muslimat

Jombang, Jawa Timur, gagal diberangkatkan pada 29 Agustus 2026. Para calon jemaah sebelumnya telah berkumpul di Masjid Agung Jombang ketika pelaksanaan Mukhtar NU ke-35 berlangsung.

Persoalan serupa juga dialami jemaah yang telah berada di Tanah Suci. Pihak travel disebut tidak menyediakan tiket kepulangan sehingga 83 jemaah harus menggunakan dana pribadi untuk kembali ke Indonesia. Kondisi tersebut kemudian mendorong Kemenhaj melakukan pemeriksaan lebih jauh terhadap aktivitas PT AAT.

“Ini tentu sangat merugikan jemaah, dan saya sudah minta jajaran kami termasuk dari Jombang untuk mengusut lebih dalam,” kata Gus Irfan, Jumat (18/9/2026).

Dalam penelusuran awal, Gus Irfan menyebut jumlah calon jemaah yang tercatat di PT AAT mencapai hampir 4.000 orang. Dengan asumsi setiap jemaah rata-rata membayar Rp30 juta, nilai dana yang menjadi tanggung jawab travel tersebut mencapai sekitar Rp120 miliar. Angka itu masih merupakan taksiran berdasarkan

kan data sementara pemerintah.

Kemenhaj menduga persoalan tersebut berkaitan dengan pola gali lubang tutup lubang. Dana dari calon jemaah yang baru mendaftar diduga digunakan untuk membiayai keberangkatan jemaah yang lebih dahulu mendaftar. Ketika jumlah pendaftar baru tidak lagi mampu menopang kebutuhan keberangkatan, persoalan kemudian muncul dan sebagian jemaah tidak dapat diberangkatkan.

“Penelusuran kami sementara, ada hampir 4.000 calon jemaah umrah yang terdaftar di sini, dan jika kita asumsikan semua rata-rata membayar Rp30 juta, itu artinya Rp120 miliar yang harus dipertanggungjawabkan oleh travel ini,” ujar Gus Irfan.

Secara historis, istilah skema Ponzi merujuk pada Charles Ponzi di Amerika Serikat pada 1920. Ponzi menjanjikan keuntungan besar melalui perdagangan kupon balasan pos internasional, tetapi pembayaran kepada investor terdahulu pada praktiknya bergantung pada dana yang masuk dari investor baru. Arsip Nasional AS mencatat skema

tersebut runtuh pada 1920 setelah Ponzi menghimpun sekitar US\$15 juta dalam waktu sekitar delapan bulan.

Dalam pengertian modern, skema Ponzi memang bergantung pada aliran dana baru untuk membayar pihak yang masuk lebih dahulu. Ketika arus dana baru berhenti atau semakin banyak pihak meminta pembayaran, sistem tersebut dapat runtuh. Karena itu, dugaan penerapan pola serupa dalam kasus PT AAT masih harus dibuktikan melalui penyelidikan dan proses hukum.

Kemenhaj kini berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan untuk mendalami perkara tersebut. Pemerintah juga menyatakan akan mengupayakan pemulihan dana jemaah, meski mekanisme pengembalian masih bergantung pada hasil penanganan kasus dan kondisi aset maupun pengelola travel. Hingga berita ini ditulis, PT AAT belum memberikan pernyataan resmi mengenai dugaan skema Ponzi dan taksiran kerugian Rp120 miliar.*

Kasus Febrie Masuk Pengadilan, Kuasa Hukum Minta Bukti Diuji Terbuka



Kasus Febrie Masuk Pengadilan, Kuasa Hukum Minta Bukti Diuji Terbuka

Laporan: Hadi

JAKARTA, BP-Perkara dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah memasuki tahap penuntutan. Kuasa hukum Febrie, Febri Diansyah, meminta seluruh tuduhan dan barang bukti diuji secara terbuka serta objektif dalam persidangan.

Tim 9 Kejaksaan Agung melimpahkan tersangka, barang bukti, dan berkas perkara Febrie serta dua tersangka lainnya, Don Ritto dan Nurman Herin, kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (18/9/2026). Berkas perkara tersebut sebelumnya telah dinyatakan lengkap atau P-21.

Setelah pelimpahan tahap II, penuntut umum Kejari Jakarta Selatan memiliki waktu untuk menyusun surat dakwaan dan melengkapi administrasi perkara sebelum melimpahkannya ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Febrie mengatakan masuknya perkara ke tahap persidangan merupakan kesempatan untuk menguji setiap klaim dan bukti yang digunakan untuk menjerat kliennya. Ia menilai pembuktian di pengadilan penting agar fakta perkara dapat dipisahkan dari dugaan yang belum terbukti.

“Melalui proses pengujian yang terbuka dan objektiflah

kita bisa tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar,” kata Febrie, Jumat (18/9).

Perhatian kuasa hukum juga tertuju pada barang bukti yang disita penyidik. Menurut Febrie, hubungan antara setiap barang bukti dan tindak pidana yang didakwakan harus dijelaskan secara terang, bukan didasarkan asumsi atau spekulasi.

“Barang bukti dalam proses pidana itu tidak boleh bersifat asumsi, tidak boleh bersifat spekulasi, dan tidak boleh bersifat, kalau dalam bahasa sehari-hari, ‘cocokologi,’” ujarnya.

Dalam perkara ini, Kejaksaan menetapkan Febrie sebagai tersangka dugaan pemerasan dan TPPU yang dikaitkan dengan temuan emas seberat 74 kilogram serta uang tunai Rp543 miliar di sebuah rumah di Sentul. Kejaksaan juga menetapkan Nurman Herin dan pengacara Don Ritto sebagai tersangka dalam perkara TPPU tersebut.

Ketua Tim 9 sekaligus Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Rudi Margono menyebut dugaan tindak pidana asal dalam perkara tersebut berkaitan dengan pemerasan. Kejaksaan mengaitkannya dengan penanganan perkara PT ASABRI dan/atau PT Asuransi Jiwasraya.

Dugaan pemerasan itu disebut berkaitan dengan penanganan perkara Jiwasraya-Asabri dan melibatkan pengusaha properti

Tan Kian. Namun, berbagai tuduhan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum di pengadilan.

Febrie sebelumnya telah menempuh jalur praperadilan dengan mengajukan dua gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kedua permohonan tersebut ditolak oleh hakim tunggal praperadilan. Dengan masuknya perkara ke tahap penuntutan, pengujian substansi perkara kini akan berlanjut melalui mekanisme persidangan.

Secara historis, penanganan perkara TPPU di Indonesia memiliki landasan khusus sejak Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, yang kemudian diperbarui melalui UU Nomor 25 Tahun 2003 dan digantikan UU Nomor 8 Tahun 2010. UU 8/2010 mengatur antara lain perbuatan menyembunyikan atau menyembunyikan asal-usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana.

Kerangka tersebut juga menempatkan penelusuran aliran dana atau pendekatan follow the money sebagai bagian penting dalam pemberantasan pencucian uang. Dalam perkembangan internasional, rezim anti pencucian uang turut mengacu pada standar Financial Action Task Force (FATF), yang menjadi salah satu rujukan dalam penguatan sistem pencegahan dan pemberantasan TPPU di Indonesia.*

Bupati H Muh Adios dan Kantah Asnani Perkuat Sinergi, Pelayanan Pertanahan Buton Selatan Ditingkatkan

meningkatkan efektivitas pelayanan, memperkuat koordinasi, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” kata Asnani.

Penguatan layanan pertanahan memiliki konteks yang panjang dalam sejarah admin-

istrasi pertanahan Indonesia. Secara nasional, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menjadi salah satu tonggak utama penataan hukum agraria nasional. Dalam perkembangan beri-

kutnya, pemerintah mendorong digitalisasi dan penyederhanaan layanan pertanahan untuk meningkatkan kepastian administrasi serta akses masyarakat terhadap layanan.

Dalam konteks Buton Selatan, MoU dan PKS tersebut menjadi

dasar bagi kedua pihak untuk melanjutkan koordinasi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Pemkab Busel dan Kantor Pertanahan berkomitmen mendorong pelayanan yang lebih baik, cepat, terpadu, dan memberikan manfaat bagi warga. (*)

Lapas Baubau Periksa 32 Kamar, Razia Gabungan TNI, Polri dan BNN Tak Temukan HP dan Narkoba



petugas tidak menemukan telepon seluler maupun narkoba.

Operasi tersebut diawali dengan upacara dan melibatkan petugas Lapas Baubau bersama unsur TNI, Polri, serta Badan Narkotika Nasional (BNN). Sebanyak 32 kamar, termasuk kamar warga binaan perempuan, diperiksa dengan membagi petugas ke dalam empat tim.

Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban (Minkamtib) Lapas Baubau Muhammad Nur Aksa, yang mewakili Kepala Lapas Kelas IIA Baubau Abdul Waris, mengatakan kegiatan berlangsung aman dan tertib. Sejumlah barang yang dinilai berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban turut

diamankan meski tidak tergolong barang terlarang.

“Barang tersebut bukan termasuk kategori terlarang, tetapi tetap disita agar tidak disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan,” kata Muhammad Nur Aksa.

Pengawasan terhadap ponsel dan narkoba menjadi bagian penting dalam pengamanan lembaga masyarakat karena kedua jenis barang tersebut dapat berkaitan dengan pelanggaran tata tertib maupun tindak pidana. Secara historis, Indonesia telah lama mengembangkan pengawasan narkoba melalui pembentukan Badan Narkotika Nasional pada 2002, sementara kerja sama internasional dalam pengenda-

lian narkoba berkembang sejak Konvensi Tunggal PBB tentang Narkotika 1961.

Muhammad Nur Aksa menegaskan pengeledahan bukan kegiatan insidental. Pemeriksaan dilakukan secara berkesinambungan, baik mingguan maupun bulanan, dengan melibatkan aparat penegak hukum. “Pelanggaran terkait ponsel maupun narkoba adalah pelanggaran berat. Siapa pun pelakunya, baik warga binaan maupun petugas, akan ditindak tegas,” ujarnya.

Selain pengeledahan, tes urine juga dilakukan untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan narkoba di lingkungan Lapas. Kepala Seksi Rehabilitasi BNN

Baubau Juriadin menyatakan hasil pemeriksaan terhadap 20 orang yang menjalani tes urine dinyatakan negatif. “Semua hasilnya negatif. Jika ditemukan positif, kami akan langsung melakukan penanganan hukum sekaligus rehabilitasi,” katanya.

Juriadin mengapresiasi keterlibatan BNN dalam pengawasan rutin di Lapas Baubau. Ia berharap pemeriksaan yang dilakukan secara konsisten dapat menjaga lingkungan masyarakat tetap bebas dari narkoba. Operasi gabungan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya Lapas Baubau menerapkan prinsip zero tolerance terhadap pelanggaran keamanan dan peredaran barang terlarang. (*)

Bebas Sanksi Administrasi! Pemkab Buton Selatan Buka Kesempatan Penyelesaian Tunggalan PBB-P2



sinergi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Selatan. Kerja sama ini diarahkan untuk menertibkan administrasi pertanahan serta memperbarui dan menyinkronkan data objek dan subjek pajak agar pengelolaan perpajakan berjalan lebih tertib dan akurat.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah penerapan Surat Keterangan Lunas (SKL) PBB-P2 sebagai syarat dalam proses administrasi pertanahan, sesuai ketentuan peraturan

an yang berlaku.

“Kebijakan ini saling melengkapi. Di satu sisi pemutihan memberi kemudahan bagi masyarakat, di sisi lain sinergi dengan Kantor Pertanahan memperkuat tertib administrasi dan basis data perpajakan daerah,” jelasnya.

Amril menegaskan, upaya ini tidak sekadar mengejar penerimaan, melainkan juga membangun kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakan. PBB-P2 sendiri merupakan salah satu sum-

ber utama PAD yang menopang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di Buton Selatan.

“Ke depan, Bapenda akan terus memperkuat koordinasi dengan Kantor Pertanahan serta Organisasi Perangkat Daerah terkait guna meningkatkan kualitas data, pelayanan, dan pemungutan agar berjalan lebih efektif, tertib, transparan, dan akuntabel,” tutup Amril Tamim. (*)

Bapas Baubau Perkuat Tata Kelola Anggaran dan Kehumasan Melalui Bimtek

untuk meningkatkan pemahaman jajaran mengenai pengelolaan anggaran yang efektif dan akuntabel serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penguatan kompetensi tersebut diperlukan agar setiap tahapan pengelolaan anggaran dapat mendukung pencapaian program dan kegiatan masyarakat.

Selain aspek anggaran, kegiatan juga memberikan perhatian terhadap fungsi kehumasan. Kemampuan menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan tugas dan pelayanan masyarakat dinilai penting untuk membangun komunikasi publik yang jelas, terbuka, dan mudah dipahami masyarakat.

“Melalui kegiatan

tan ini, kami berharap pengetahuan dan kompetensi jajaran terus meningkat sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masyarakat secara profesional,” kata Mustar Taro.

Penguatan tata kelola keuangan pemerintah di Indonesia memiliki landasan penting sejak reformasi administrasi negara, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Sementara itu, keterbukaan informasi publik memperoleh landasan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam perkembangan tata kelola pemer-

intahan secara global, transparansi anggaran dan komunikasi publik juga menjadi bagian penting dari prinsip pemerintahan terbuka. Karena itu, peningkatan kapasitas aparatur tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis, tetapi juga kemampuan mempertanggungjawabkan program serta menyampaikan informasi kepada publik.

Bapas Kelas II Baubau berharap hasil Bimtek Penyusunan Anggaran dan Kehumasan dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga kualitas tata kelola organisasi, komunikasi publik, dan pelayanan masyarakat kepada masyarakat semakin baik. (*)

Ditemukan Sumber Air Baru di Burangasi, Bupati Adios: Jawaban Atas Doa Warga yang Selama Ini Menanti



Organisasi Perangkat Daerah, serta Camat Lapandewa. Melihat langsung aliran air tersebut, Bupati menyampaikan rasa syukur yang mendalam.

“Alhamdulillah, hari ini kita berdiri di sini menyaksikan air yang baru beberapa hari ini muncul. Saya sangat bersyukur. Ini bukan sekadar air yang keluar dari tanah, me-

lainkan jawaban atas doa, harapan, dan kesabaran warga Burangasi yang selama ini menanti,” ucapnya, Minggu (13/9/2026).

Bupati menegaskan ketersediaan air bersih

merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang wajib mendapat perhatian pemerintah. Ia menyadari betapa beratnya warga memenuhi kebutuhan air sehari-hari selama ini, sehingga ditemukannya sumber air ini menjadi langkah awal yang harus segera ditindaklanjuti.

“Air adalah kehidupan. Selama ini kami tahu betapa beratnya warga Burangasi memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Maka ketika air ini akhirnya ditemukan, hati kami turut gembira. Tugas kami belum selesai sampai air ini

mengalir ke setiap rumah, ke setiap dapur warga,” katanya.

Kehadiran mantan pimpinan, tokoh adat, wakil rakyat, serta aparat daerah di lokasi tersebut juga mendapat apresiasi khusus. Sinergi berbagai pihak dinilai menjadi kunci mengatasi kesulitan bersama.

“Ini bukti bahwa ketika kita bersatu, kesulitan apa pun bisa

kita atasi. Kita tidak boleh membiarkan warga kesulitan air di tanah sendiri,” tuturnya.

Bupati juga mengingatkan agar sumber air ini dikelola dan dijaga bersama agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan hingga ke generasi mendatang.

“Ke depannya, pengelolaan sumber air ini harus dijaga bersama, agar man-

faatnya terasa panjang bagi anak cucu kita,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Buton Selatan akan segera menata sarana pengaliran serta membangun fasilitas pendukung lainnya agar sumber air tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal bagi warga Desa Burangasi dan sekitarnya. (*)

Dinsosnaker Baubau Petakan Anak Jalanan, Akses Pendidikan Disiapkan



Laporan: Prasetyo M

BAUBAU, BP- Pemerintah Kota Baubau menyiapkan langkah lanjutan untuk menangani anak yang masih beraktivitas di jalan dengan pendekatan sosial dan pendidikan. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Baubau akan memverifikasi kondisi anak dan keluarganya serta mengupayakan pembukaan kembali akses pendidikan bagi anak yang telah putus sekolah.

Upaya tersebut dilakukan setelah tim terpadu Dinsosnaker turun melakukan pemantauan dan asesmen di sejumlah lokasi di Baubau, Rabu (9/9/2026). Tim menyanggani perempatan SMAN 2 Baubau, eks Kantor Dinas Sosial, eks Kantor Penerangan, perempatan SDN 3 Baubau, simpangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, serta kawasan lampu merah Kilo 1.

Kepala Dinsos-

naker Kota Baubau, Dra. Hj. Siti Amalia Abibu, M.Si., mengatakan pemantauan tersebut diperlukan untuk mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan, bukan sekadar mencatat keberadaan anak jalanan, pemulung, gelandangan, dan pengemis. Pemerintah juga mengecek kondisi sosial ekonomi serta bantuan yang sebelumnya diterima.

“Tim terpadu turun bersama untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kepada gelandangan dan pengemis, khususnya anak-anak yang ada di Kota Baubau,” kata Siti Amalia dalam siaran pers, Jumat (11/9/2026).

Dalam kegiatan itu, petugas menemukan sejumlah pemulung dan anak jalanan yang sebelumnya telah memperoleh bantuan Atensi dari Sentra Meohai Kementerian Sosial RI, termasuk bantuan pemenuhan hidup layak atau sembako. Sebagian warga yang ditemui juga tercatat

sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial lainnya. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi Dinsosnaker untuk melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan, kondisi sosial ekonomi, serta kesesuaian bantuan.

Pendekatan pendataan dan asesmen semacam ini sejalan dengan perkembangan kebijakan perlindungan sosial di Indonesia yang sejak era reformasi semakin diarahkan pada pendataan rumah tangga dan pemberian bantuan berdasarkan kondisi penerima. Secara global, perlindungan anak juga berkembang melalui Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diadopsi pada 1989 dan menempatkan kepentingan terbaik anak, perlindungan, serta hak memperoleh pendidikan sebagai bagian penting dari kebijakan negara.

“Pendataan ini sangat penting untuk merencanakan penyelesaian akar masalah. Kita

ingin menyelesaikan permasalahan mereka secara permanen dan bersifat humanis,” ujar Siti Amalia.

Bagi anak yang masih berada di jalan, Dinsosnaker memberikan edukasi kepada keluarga agar tidak melibatkan anak dalam aktivitas yang dapat membahayakan keselamatan dan masa depan mereka. Sementara anak yang telah putus sekolah akan dikoordinasikan untuk memperoleh kembali akses pendidikan, antara lain melalui program Sekolah Rakyat maupun pendidikan pesantren sesuai kondisi dan keinginan anak.

Dinsosnaker juga akan berkoordinasi dengan Sentra Meohai Kemensos RI, perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, pekerja sosial, dan TKSK. “Kita ingin anak-anak mereka tidak lagi mengemis di jalan karena sangat berisiko terhadap keselamatan mereka,” tegas Siti Amalia.(*)

Bunda Literasi Baubau Sitti Aryati Yusran Dorong TBM Jadi Penggerak Budaya Membaca Masyarakat



Laporan: Andina

BAUBAU, BP- Penguatan komunitas literasi dinilai penting untuk menjaga budaya membaca masyarakat di tengah deras arus informasi digital. Pesan itu mengemuka dalam Workshop Pengelolaan Komunitas Penggerak Literasi yang digelar di Aula Hotel Mira, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, Kamis (10/9/2026), dan dibuka Bunda Literasi Kota Baubau Hj Sitti Aryati Yusran.

Kegiatan tersebut mempertemukan unsur lintas sektor, mulai dari jajaran dinas, kecamatan, kelurahan hingga pegiat literasi se-Kepulauan Buton. Forum itu diarahkan untuk memperkuat sinergi pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat sekaligus menjadi ruang berbagi pengalaman serta praktik pengelolaan komunitas literasi.

Sitti Aryati memberikan apresiasi kepada Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Inspirasi Kampung dan sinergi seluruh pihak, saya yakin kita bisa terus menghidupkan minat baca anak-anak kita sekaligus memperkuat jaringan literasi di ka-

gan masyarakat. Ia berharap keberadaan TBM tersebut dapat terus berkelanjutan dan menjadi salah satu penggerak literasi berbasis komunitas di Kepulauan Buton.

“Literasi bukan sebatas kemampuan membaca dan menulis, tetapi tentang membuka jendela wawasan dan menggerakkan perubahan di akar rumput,” ujar Sitti Aryati.

Menurut dia, tantangan membangun minat baca anak semakin kompleks seiring perkembangan teknologi. Gawai dan beragam hiburan digital memberikan pilihan aktivitas yang dapat menggeser kebiasaan membaca. Karena itu, budaya literasi membutuhkan pendampingan, kepedulian, dan komitmen bersama agar tumbuh sebagai kebiasaan di lingkungan keluarga dan masyarakat.

“Lewat semangat yang ditunjukkan TBM Inspirasi Kampung dan sinergi seluruh pihak, saya yakin kita bisa terus menghidupkan minat baca anak-anak kita sekaligus memperkuat jaringan literasi di ka-

wasan Kepulauan Buton,” katanya.

Gerakan literasi berbasis masyarakat memiliki akar panjang di Indonesia melalui perpustakaan, taman bacaan, dan berbagai komunitas pembelajaran. Secara global, konsep literasi juga berkembang dari kemampuan membaca dan menulis menjadi kecakapan memahami dan menggunakan informasi, termasuk informasi digital. Perubahan tersebut membuat komunitas lokal tetap memiliki peran penting dalam menciptakan ruang belajar yang mudah dijangkau masyarakat.

Sitti Aryati berharap workshop tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan berbagi pengetahuan, tetapi mendorong keberlanjutan komunitas literasi di daerah. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada panitia, pengurus, dan seluruh peserta yang telah mendukung kegiatan tersebut dengan harapan gerakan literasi dapat berkontribusi membentuk generasi yang cerdas, berkarakter, serta mencintai budaya bangsa.(*)

DP3AKB Baubau Raih Penghargaan BKKBN Sultra Atas Penguatan 43 Kampung KB

Laporan: Andina

BAUBAU, BP- Penguatan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) di Kota Baubau mendapat apresiasi dari Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara. Apresiasi tersebut diberikan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Baubau atas sinergi dan dukungannya dalam Penguatan Kampung KB Tingkat Provinsi Sultra Tahun 2026.

Saat ini, Baubau memiliki 43 Kampung KB yang tersebar di berbagai wilayah. Pemerintah daerah

melalui DP3AKB berupaya mengembangkan seluruh kampung tersebut melalui integrasi program pemberdayaan dan kerja sama lintas sektor, meski capaian indikator di setiap wilayah belum sepenuhnya merata.

Kepala DP3AKB Kota Baubau Abdul Rahman, S.Pd., M.Si., dalam siaran pers, Kamis (10/9/2026), mengatakan penghargaan dari BKKBN Sultra menjadi dorongan bagi jajaran DP3AKB untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan keluarga dan program keluarga berencana. “Penghargaan ini menjadi penguat bagi kami untuk terus mewujudkan

kan program pembangunan keluarga dan keluarga berencana. Ke depan, tentu kami berupaya agar pelaksanaan program menjadi lebih baik lagi,” ujar Abdul Rahman.

Menurut Abdul Rahman, keberhasilan Kampung KB sangat ditentukan oleh kolaborasi berbagai sektor. Karena itu, DP3AKB tidak menempatkan Kampung KB semata sebagai lokasi pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana, tetapi sebagai ruang untuk mengintegrasikan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

Upaya tersebut diperkuat rekam jejak prestasi di tingkat provinsi. Selama dua tahun berturut-turut, perwakilan Kampung KB dari Baubau berhasil menjadi juara dalam lomba tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara dan kemudian dipercaya mewakili Sultra pada tingkat nasional.

Secara nasional, gagasan Kampung KB mulai diperkenalkan pemerintah pada 2016 sebagai bagian dari upaya memperkuat pembangunan kependudukan dan keluarga melalui pendekatan berbasis wilayah. Dalam perkembangannya, konsep tersebut diperluas

menjadi Kampung Keluarga Berkualitas agar cakupan intervensinya tidak hanya berkaitan dengan keluarga berencana, tetapi juga pembangunan keluarga dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pendekatan berbasis komunitas tersebut sejalan dengan perkembangan kebijakan kependudukan di berbagai negara. Secara internasional, pembangunan keluar-

ga, kesehatan reproduksi, pemberdayaan perempuan, serta pengendalian pertumbuhan penduduk ditempatkan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui Sustainable Development Goals (SDGs) yang diadopsi negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2015.

DP3AKB Baubau kini mendorong 43 Kampung KB berkem-

bang sesuai potensi dan karakteristik wilayah masing-masing. “Kami optimistis seluruh Kampung KB dapat berkembang sesuai potensi serta keunikannya masing-masing,” kata Abdul Rahman. Penguatan tersebut diarahkan agar Kampung KB menjadi pusat gerakan masyarakat dalam membangun keluarga yang sehat, mandiri, dan sejahtera.(*)

